

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah kepemimpinan daerah di Indonesia merupakan bagian penting dari perjuangan bangsa dalam menghadapi kolonialisme merebut kemerdekaan, serta membangun pemerintahan yang berdaulat.¹ Wali Kota adalah pemimpin kota yang punya peran penting, baik dalam mengatur pemerintahan maupun mewakili kota secara politik pada masa tertentu. Di Padang, sebagai kota besar di Pantai Barat Sumatera, jabatan Wali Kota telah dijabat oleh berbagai tokoh dengan latar belakang dan peran yang beragam, termasuk di masa-masa genting seperti era pasca-Proklamasi 1945 dan Agresi Militer Belanda.²

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi genting karena Belanda berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia melalui dua agresi militer dan strategi politik federal. Agresi Militer I berlangsung pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 dan Agresi II pada 19 Desember 1948, dimana tentara Belanda melancarkan operasi militer untuk melemahkan Republik Indonesia.³ Selain itu, Belanda mendirikan negara-negara boneka seperti Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dalam rangka mendirikan sistem federal yang terbukti kontraproduktif dan akhirnya ditolak melalui Persetujuan Linggajati dan Perundingan Renville pada awal 1948.⁴ Dengan demikian, periode 1947–1949 merupakan masa transisi yang penuh konflik dan ketidakpastian, di mana pemerintahan daerah, termasuk jabatan Wali Kota, memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan lokal.

¹ Hari Suriadi et al., *Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*, 2, no. 2

² Dadang Sufianto, "Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (2020): h.274-280, <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2>.

³ D. Latif et al., *Beberapa Catatan Tentang Sejarah Negara Indonesia 1945–1950* (Universitas Indonesia, 2003), 274–75.

⁴ Laessach M. Pakatuwo et al., "Negara Boneka Belanda (Negara Indonesia Timur) 1945–1950," *Jurnal Pattingalloang* 5, no. 1 (2018): h.27-37, [https://doi.org/10.1016/0006-291x\(75\)90498-2](https://doi.org/10.1016/0006-291x(75)90498-2).

Abdoel Hakim Nasution berasal dari Sumatera Utara dan merupakan sosok terdidik lulusan STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) di Batavia. Ia aktif dalam organisasi pergerakan pemuda Jong Sumatranen Bond dan dikenal sebagai tokoh intelektual dari kalangan kaum peranakan Sumatera.⁵

Sejak awal abad ke-20 ia telah tinggal dan berkarier di Padang, menjabat sebagai anggota Dewan Kota (Gemeenteraad) sejak tahun 1921, serta berkiprah Nasution berperan penting dalam sejarah medis Indonesia, terutama dalam konteks pengembangan sistem kesehatan di era kolonial. Kontribusinya dalam pendidikan kedokteran sangat signifikan, terutama dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh kolonialisme dan keragaman sosial di Indonesia.⁶ Keterlibatan Nasution dalam pendidikan kedokteran mencerminkan upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia.

Penunjukan Abdoel Hakim sebagai Wali Kota Padang oleh pemerintah kolonial Belanda menempatkannya dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, ia merupakan figur yang telah lama tinggal, bekerja, dan berinteraksi dengan masyarakat Padang, yang memberinya semacam legitimasi sosial sebagai bagian dari elite lokal. Di sisi lain, pengangkatannya terjadi dalam konteks kembalinya kekuasaan Belanda melalui Agresi Militer I pada tahun 1947, yang secara langsung bertentangan dengan aspirasi kemerdekaan rakyat Indonesia.⁷ Sebagai pejabat administratif yang dilantik oleh penguasa kolonial, Abdoel Hakim berada dalam situasi menjalankan fungsi pemerintahan sipil di tengah kecamuk perang kemerdekaan, sembari mempertahankan stabilitas kota yang terancam oleh konflik militer, politik, dan sosial. keberadaan Abdoel Hakim sebagai wali kota di masa tersebut memperlihatkan bagaimana Belanda berupaya menggunakan tokoh-tokoh

⁵ Freek Colombijn, "Dewan Kota Kolonial Di Padang (Sumatra) Sebagai Arena Politik," *Jurnal Studi Asia Tenggara* 26, no. 2 (1995): h.263, URL <https://www.jstor.org/stable/20071718>.

⁶ Madekhan, "Tantangan Pembaruan Pendidikan Di Indonesia," *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2021): h. 130, <https://doi.org/10.30736/ktb.v5i2.702>.

⁷ Colombijn, "Dewan Kota Kolonial Di Padang (Sumatra) Sebagai Arena Politik," h.264.

bumiputera terdidik untuk memperoleh dukungan lokal dan membentuk pemerintahan sipil yang tampak legal di mata masyarakat internasional.⁸

Namun, langkah ini juga mengandung risiko sosial dan moral, karena para tokoh seperti Abdoel Hakim harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak: pemerintah kolonial yang menuntut loyalitas, masyarakat lokal yang sebagian besar pro-Republik, dan pejuang kemerdekaan yang mencurigai setiap bentuk kerja sama dengan Belanda. Dalam konteks Sumatera Barat yang dikenal dengan semangat revolusioner dan militansinya, posisi Abdoel Hakim menjadi semakin kompleks. Ia harus membimbing hubungan kekuasaan yang rumit antara kolonialisme dan Republik yang tengah berjuang untuk hidup Kepemimpinannya berlangsung dalam suasana ketegangan antara kekuatan Republik dan upaya Belanda menguasai kembali wilayah Indonesia. Sebagai seorang birokrat yang telah lama terlibat dalam pemerintahan lokal, Abdoel Hakim Nasution memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola kota. Namun, posisi yang ia duduki pada masa itu tentu tidak terlepas dari tekanan politik, baik dari pihak kolonial maupun dari kalangan pejuang Republik yang memperjuangkan kedaulatan Indonesia secara penuh.

Kajian terhadap sosok Abdoel Hakim Nasution menarik untuk dilakukan karena memperlihatkan dinamika sejarah lokal dalam perspektif yang lebih luas. Ia merupakan contoh tokoh yang berada di persimpangan peran sebagai pelayan publik dan sebagai bagian dari sistem kolonial yang sedang mengalami transisi. Dalam kajian sejarah politik dan birokrasi Indonesia, tokoh-tokoh seperti ini seringkali luput dari perhatian karena dianggap tidak berada dalam perjuangan yang jelas. Studi mengenai kepemimpinan lokal selama masa peralihan kekuasaan dari Belanda ke Republik Indonesia sangat penting untuk memahami nuansa sejarah yang lebih mendalam.

Keberadaan tokoh dari luar Minangkabau yang menduduki posisi penting di Kota Padang juga menjadi bahan kajian menarik dari sisi sejarah sosial dan integrasi antar etnis di Sumatera Barat. Meskipun berasal dari Sumatera

⁸ "Politik Diplomasi Masa Revolusi Menuju Pengakuan Kemerdekaan Indonesia (1946–1949)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 1 (2021): h. 122–131, <https://doi.org/10.30738/sosio.v7i1.9431>.

Utara, Abdoel Hakim telah berkarier dan menetap di Padang dalam waktu yang panjang. Hal ini mencerminkan mobilitas sosial dan profesional antar wilayah pada masa Hindia Belanda serta mencerminkan keterbukaan kota-kota pelabuhan seperti Padang terhadap para perantau yang memiliki kompetensi. Hingga saat ini, belum banyak kajian akademik yang secara khusus menelusuri jejak kepemimpinan Abdoel Hakim Nasution di Padang. Tokoh-tokoh dari masa revolusi, terutama yang menjabat pada periode transisi, sering kali hanya disinggung sepintas dalam literatur sejarah lokal maupun nasional. Dengan demikian, kajian ini penting untuk mengangkat kembali peran dan kontribusi Abdoel Hakim Nasution dalam membangun tata kelola pemerintahan kota di tengah masa transisi yang sulit dan penuh tantangan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana kepemimpinan lokal dijalankan dalam situasi kolonial dan revolusioner, serta bagaimana sosok seperti Abdoel Hakim Nasution dalam menjalankan tugasnya. Kajian ini juga dapat memperkaya wacana historiografi lokal Sumatera Barat dan memperluas cakupan pemahaman kita tentang tokoh-tokoh penting yang pernah berperan dalam sejarah Kota Padang.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi dasar dalam mengkaji posisi Abdoel Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang. Rumusan masalah ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam proses penelitian serta membantu dalam mengungkap peristiwa sejarah secara lebih mendalam dan terfokus.

1. Mengapa Abdoel Hakim Nasution menjadi Wali Kota Padang ?
2. Apakah seorang tokoh Koperatif atau Non Koperatif ?
3. Bagaimana kondisi kota Padang pada masa jabatan Abdoel Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang selama periode 1947–1949 ?

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan pembahasan yang terlalu melebar dan agar penelitian ini tetap fokus serta mendalam, maka perlu ditetapkan batasan masalah yang akan dikaji. Batasan ini dimaksudkan untuk menegaskan ruang lingkup pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian serta mempermudah peneliti dalam menganalisis peristiwa dan tokoh yang diteliti.

1. Penelitian ini secara rinci membahas biografi politik Abdoel Hakim Nasution hingga menjadi Wali Kota Padang.
2. Penelitian membatasi kajian pada sikap politik Abdoel Hakim Nasution dalam konteks masa jabatannya sebagai wali kota, apakah ia dapat dikategorikan sebagai tokoh kooperatif terhadap pemerintah kolonial atau memiliki ruang tertentu untuk mendukung perjuangan Republik.
3. Penelitian difokuskan pada tantangan politik, sosial, dan keamanan yang dihadapi Abdoel Hakim Nasution selama menjabat Wali Kota Padang, serta peran yang dijalankannya baik dalam aspek administratif pemerintahan kota maupun dalam konteks sosial-politik di tengah revolusi kemerdekaan.

a. Batasan spasial

Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kota Padang, sebagai ruang utama di mana Abdoel Hakim Nasution menjalankan tugasnya sebagai wali kota. Meskipun tokoh ini berasal dari Sumatera Utara, fokus geografis tetap tertuju pada dinamika pemerintahan dan masyarakat di Kota Padang selama masa jabatannya.

b. Batasan Temporal

Penelitian ini dibatasi pada kurun waktu Abdul Hakim masuk ke dunia politik yakni organisasi Jong Sumatra 1919 hingga tahun 1949, yaitu masa Abdoel Hakim Nasution menjabat sebagai Wali Kota Padang. Periode ini mencakup fase penting dalam sejarah Indonesia diantara pasca-Proklamasi

Kemerdekaan dan masa agresi militer Belanda, yang menjadi konteks utama pembahasan.

c. Batasan Tematis

Penelitian ini secara tematis dibatasi pada kajian mengenai kepemimpinan Abdoel Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang tahun 1947–1949. Fokus penelitian diarahkan pada tiga hal utama. Alasan dan latar belakang pengangkatan Abdoel Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang, berikutnya sikap politiknya apakah bersifat kooperatif atau non-kooperatif dalam menghadapi situasi pemerintahan kolonial dan masyarakat lokal, serta kondisi kota Padang masa kepemimpin dalam mengemban jabatan wali kota Padang pada masa revolusi kemerdekaan. Penelitian ini tidak membahas keseluruhan riwayat hidup Abdoel Hakim Nasution, melainkan hanya aspek yang berkaitan langsung dengan masa jabatannya sebagai wali kota.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang pengangkatan Abdoel Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang pada tahun 1947, mengkaji sikap politiknya apakah bersifat kooperatif atau non-kooperatif, serta menjelaskan tantangan dan peran yang dijalankannya dalam memimpin Kota Padang pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1947–1949.

- a. Menganalisis latar belakang pengangkatan Abdoel Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang pada tahun 1947.
- b. Mengkaji sikap politik Abdoel Hakim Nasution, apakah bersifat kooperatif atau non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial serta masyarakat lokal.
- c. Untuk menjelaskan kondisi kota Padang pada masa jabatan Abdoel Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang selama periode 1947–1949.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Manfaat tersebut tidak hanya berguna bagi pengembangan kajian sejarah lokal, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik pada studi tentang kepemimpinan daerah dan tokoh-tokoh yang berperan dalam masa transisi sejarah Indonesia. Adapun manfaat yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut

- a. Memberikan tambahan informasi dan perspektif baru terhadap historiografi Kota Padang dan Sumatera Barat pada masa revolusi kemerdekaan.
- b. Menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan pemerhati sejarah yang tertarik pada studi kepemimpinan lokal dan tokoh-tokoh dalam sejarah daerah.
- c. Mendorong penguatan kajian sejarah lokal yang lebih inklusif dan tidak hanya berfokus pada tokoh-tokoh yang populer atau dominan.
- d. Menumbuhkan kesadaran pentingnya dokumentasi sejarah terhadap figur-figur yang pernah memimpin daerah tetapi belum banyak mendapat perhatian dalam penulisan sejarah.

D. Penjelasan Judul

Nama Abdoel Hakim Nasution merujuk pada tokoh utama dalam kajian ini. Beliau merupakan seorang dokter yang berasal dari Sumatera Utara dan ditunjuk sebagai Wali Kota Padang oleh pemerintahan sipil Hindia Belanda pada masa agresi militer Belanda.⁹

Wali Kota Padang 1947–1949 menunjukkan ruang waktu dan posisi kepemimpinan yang dijabat oleh tokoh ini. Periode 1947–1949 merupakan masa transisi yang penting dalam sejarah Indonesia, di mana konflik antara Belanda dan Republik Indonesia masih berlangsung dan berdampak langsung pada pemerintahan lokal, termasuk di Kota Padang.

⁹ 26 tahun Padang kota tercinta, 7 Agustus 1669-7 Agustus 1995: gerbang pariwisata Indonesia kawasan barat. Padang: [Pemda Tingkat II Kotamadya Padang](#) bekerja sama dengan PT Buana Lestari. 1995.

Dengan demikian, judul ini dirancang untuk mencerminkan fokus kajian yang tidak hanya menyoroti peran kepemimpinan Abdoel Hakim Nasution, tetapi juga menempatkannya dalam konteks ruang, waktu, dan identitas kedaerahan yang relevan dengan situasi sejarah lokal dan nasional pada masa tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung dan memperkuat kajian ini, diperlukan penelaahan terhadap yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu membahas topik yang berkaitan dengan Abdoel Hakim Nasution, kepemimpinan lokal pada masa kolonial, serta dinamika sosial-politik di Kota Padang pada periode 1945–1949. Dengan demikian, penelitian ini dapat menemukan posisi dan kontribusinya dalam memperkaya historiografi sejarah lokal.

skripsi yang membahas tentang Perjuangan Batalyon Singa Harau dalam Revolusi Fisik di Sumatera Barat. Padang: Skripsi IAIN 2004, karya Herlina Zamri membahas secara mendalam peran Batalyon Singa Harau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di wilayah Sumatera Barat selama masa revolusi fisik 1945-1949. Batalyon ini lahir di Kabupaten Limapuluh Kota dengan markas di Situjuh dan memiliki basis perjuangan yang meluas hingga ke berbagai daerah seperti Padang, Sawahlunto, Solok, dan Bangkinang. Zamri menjelaskan bagaimana Batalyon Singa Harau aktif berpartisipasi dalam berbagai peristiwa penting, termasuk Agresi Militer Belanda I dan II, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), serta 13 peristiwa Situjuh Batur dan penyerbuan ke Kota Payakumbuh.¹⁰

Skripsi Jujun Kurniawan dengan judul Perkembangan Kota Malang 1914-1942: kajian atas intervensi pemerintah kolonial Hindia Belanda mahasiswa lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 2006. Pada skripsi ini berisi tentang

¹⁰ Herlina Zamri, “Perjuangan Batalyon Singa Harau Dalam Revolusi Fisik Di Sumatera Barat” (Skripsi, IAIN Padang, 2004).

kondisi geografis dan perkembangan Kota Malang serta perubahan administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda.¹¹

Penelitian yang dilakukan Undri (2015) dalam penelitiannya tentang *Struktur Komandemen Sumatera Barat* menjelaskan bagaimana markas militer dan administrasi lokal (termasuk Padang) mengalami tekanan dan pergeseran akibat agresi Belanda II dan setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai bagian dari Badan Pertolongan Korban Perang. BKR bukan badan militer dan semata-mata semacam Hansip Wanra saja saat itu.¹²

Artikel jurnal yang ditulis oleh Setia Nugraha dengan judul Kota Sukabumi: dari distrik menjadi Gemeente (1815-1914)' di publish pada jurnal *PATANJALA* Vol.9 No.3 tahun 2017. Artikel ini berisi tentang tahapan atau proses perubahan status kota sukabumi dari distrik menjadi gemeente, dan pada artikel ini juga dibahas apa yang menjadi pertimbangan perubahan status kota sukabumi tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada artikel ini membahas Kota Sukabumi sebelum menjadi gemeente, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah ketika Kota Sukabumi status nya sudah menjadi *Gemeente*.¹³

Albertus Hutagalung, Nopriyasman dan Gusti Asnandi *Jurnal MUKADIMAH* yang menjelaskan tentang kebutuhan logistik pertahanan pada saat perang dalam mempertahankan kemerdekaan. Perang antara Indonesia dengan Belanda pada tahun 1945-1949, secara militer dikategorikan sebagai perang asimetris. Ketimpangan kekuatan yang signifikan antara Belanda yang memiliki persenjataan modern dengan Indonesia yang hanya mengandalkan senjata tradisional dan senjata hasil rampasan, membuat pejuang republik membentuk strategi perang gerilya yang di satu sisi efektif dalam

¹¹ Jujun Kurniawan, "Perkembangan Kota Malang 1914–1942: Kajian Atas Intervensi Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda" (Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2006).

¹² Amanda Rara and Etni Hardi, "Perjuangan Kemerdekaan Di Lembah Anai Dan Sekitarnya Di Kecamatan X Koto (1945-1949)," *Jurnal Kronologi* 7, no. 2 (2025).

¹³ Setia Nugraha, "Kota Sukabumi: Dari Distrik Menjadi Gemeente (1815–1914)," *Journal Patanjala* 9 (2017): <https://doi.org/10.30959/patanjala.v9i3.35>.

membingungkan dan menyulitkan Belanda. Namun, di sisi lain, hal ini memicu kekerasan terhadap penduduk sipil karena Belanda kesulitan membedakan siapa musuh yang sebenarnya.¹⁴

Skripsi Khosiatin Muyassyaroh dengan judul Tata ruang Kawasan Kota Jember Tahun 1819-1929 mahasiswi lulusan UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023. Skripsi ini berisi tentang tata ruang Kawasan Kota Jember pada masa kolonial Belanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah kolonial banyak membangun fasilitas yang berguna untuk mempermudah mobilitas perekonomian sekaligus melengkapi sarana kota. Berbagai sarana dan infrastruktur khususnya di perkotaan yang dapat terhubung juga ke pedalaman daerah Jember memiliki fungsi yang hampir sama yaitu berpotensi bagi kelancaran roda perekonomian.¹⁵

Thesis Rahma Nisa Fadlila (2024) Kota Sukabumi pada masa kepemimpinan Burgemeester G.F.Rambonnet (1926-1934). Penelitian ini berfokus pada kondisi Kota Sukabumi pada masa kepemimpinan Rambonnet sebagai Burgemeester Pertama dengan mengambil judul ‘Kota Sukabumi pada masa kepemimpinan *Burgemeester G.F.Rambonnet* (1926-1934).¹⁶

Artikel yang di tulis Maman Darmansyah dengan judul Garut pada masa kepemimpinan bupati R.A.A.Soeria Kertalegawa (1915-1929) mahasiswi lulusan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada skripsi ini berisi gambaran umum garut pada masa kolonial dan terfokus pada masa kepemimpinan bupati R.A.A. Soeria Kertalegawa dan Pada masa kepemimpinannya, Garut mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama dalam bidang pariwisata, akan tetapi disisi lain Garut juga mengalami keterpurukan, khususnya dalam bidang politik.¹⁷

¹⁴ Albertus Hutagalung et al., “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pertahanan Pada Masa Revolusi Di Sumatera Barat, 1945–1949,” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2024): <http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd>.

¹⁵ Khosiatin Muyassyaroh, “Tata Ruang Kawasan Kota Jember Tahun 1819–1929” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

¹⁶ Nisa Fadlila Rahma, “Kota Sukabumi Pada Masa Kepemimpinan Burgemeester G.F. Rambonnet (1926–1934)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024).

¹⁷ Maman Darmansyah, “Garut Era Kepemimpinan Bupati R.A.A. Soeria Kertalegawa (1915–1929),” *Jurnal Renaissance* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.53878/jr.v3i2.76>.

Artikel jurnal yang berjudul Modernisasi: Sukabumi dalam arus perubahan sosial ekonomi era kolonial Belanda yang ditulis oleh Dimas Aldi Pangestu dan Zulkarnain, di publish dalam jurnal *ISTORIA* Vol.16 No.2 tahun 2020. Artikel ini berisi tentang perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sukabumi pada masa kolonial Belanda.¹⁸

Rara Amanda dan Etmi Hardi menjelaskan perjuangan kemerdekaan di Lembah Anai Kecamatan X Koto pada masa revolusi fisik di Indonesia yaitu pada tahun 1945-1949. perjuangan kemerdekaan yang dilakukan di Lembah Anai dan Sekitarnya di Kecamatan X Koto (1945-1949) serta) Mengetahui dampak perjuangan kemerdekaan di Lembah Anai dan Sekitarnya di Kecamatan X Koto (1945-1949).¹⁹

Revi Handayani 2021 yang menjelaskan *perjuangan Laskar Hizbullah (Lasykar) Kota Padang* dilandasi oleh niat “Jihad FiiSabilillah” untuk berjuang menegakkan Negara dan Agama semata-mata karena Allah, hanya dengan dorongan yang besar dan motivasi yang sangat sederhana. Namun, prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik. Laskar Hizbullah mempunyai pendirian yang tegas bahwa segala gangguan dan kekacauan ketertiban umum yang terjadi di kota Padang merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat kota Padang.²⁰

Buku yang ditulis oleh Mestika Zed tentang *sejarah perjuang kemerdekaan 1945-1949 di Kota Padang dan sekitarnya* dijelaskan gejala perubahan revolusioner yang berlangsung selama lima tahun perjuangan kemerdekaan 1945-1950 bukan gejala yang muncul tiba-tiba, dan bukan pula perjuangan sekelompok orang melainkan perjuangan hampir seluruh lapisan masyarakat, baik sipil maupun militer. Berbagai kalangan masyarakat ini melibatkan diri mereka ke dalam berbagai macam institusi atau badan-badan perjuangan yang dibentuk pada masa itu. Selain itu buku ini juga membahas

¹⁸ Dimas Aldi : Pangestu and Zulkarnain, “Modernisasi: Sukabumi Dalam Arus Perubahan Sosial Ekonomi Era Kolonial Belanda,” *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 16, no. 2 (2020).

¹⁹ Rara and Hardi, “Perjuangan Kemerdekaan Di Lembah Anai Dan Sekitarnya Di Kecamatan X Koto (1945-1949).”

²⁰ Revi Handayani, “Hesbollah Kuranji at the Front Padang Area (1945–1948),” *STKIP Pesisir Selatan, West Sumatera, Indonesia* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30983/it.v5i1.4275>.

perjuang kemerdekaan di Sumatera Barat pada masa agresi militer pertama yang berlangsung di Padang dan sesudah agresi militer Belanda kedua yang melebar ke daerah pedalaman, saat Padang telah dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Walaupun demikian, peran perempuan pada masa revolusi perjuangan kemerdekaan itu hanya disinggung sedikit oleh penulisnya, yaitu berupa pembahasan penyediaan dapur umum bagi para tentara.²¹

Pada penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji aspek militer, logistik perjuangan, tata ruang kota, atau kepemimpinan lokal pada masa kolonial di berbagai kota seperti Sukabumi, Jember, Garut, dan Malang. Kajian Undri (2015) dan Hutagalung dkk. (2024) fokus pada konteks militer dan logistik pertahanan Sumatera Barat, sementara tulisan Rara Amanda dan Revi Handayani lebih menekankan pada dinamika perjuangan fisik dan ideologis rakyat serta kelompok keagamaan seperti Hizbullah di Padang dan Lembah Anai.

Adapun skripsi tentang tokoh-tokoh seperti *Burgemeester G.F. Rambonnet di Sukabumi* (Rahma, 2024) atau Bupati Soeria Kertalegawa di Garut (Darmansyah, 2018) membahas kepemimpinan administratif kolonial yang cenderung stabil dan terlepas dari dinamika revolusi nasional. Demikian pula dengan studi-studi seperti yang dilakukan oleh Khosiatin Muyassyaroh (2023) dan Jujun Kurniawan (2006) yang lebih menyoroti pembangunan kota secara fisik dan administratif pada masa kolonial.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada figur Abdoel Hakim Nasution, seorang birokrat asal Sumatera Utara yang diangkat menjadi Wali Kota Padang pada masa yang sangat kompleks, yakni antara 1947–1949, saat Kota Padang berada di bawah tekanan kolonial pasca Proklamasi Kemerdekaan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang tidak membahas tokoh ini secara khusus, penelitian menempatkan Abdoel Hakim dalam konteks sosial-politik lokal dan nasional yang sedang bergejolak.

²¹ Mestika Zed et al., *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945–1949 Di Kota Padang Dan Sekitarnya* (Citra Budaya Indonesia, 2002).

F. Metode Penelitian

a. Heuristik

Dalam penelitian sejarah, tahap pertama adalah mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan informasi ini dikenal sebagai heuristik. Menurut G.J Renier heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Sedangkan, menurut Helius Sjamsudin heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah.²² Dengan demikian, heuristik adalah tahap penting yang menentukan kualitas dan keakuratan penelitian sejarah.

Dalam penelitian ini, heuristik dilakukan dengan mengandalkan kombinasi sumber primer dan sumber sekunder, seperti arsip kolonial, surat kabar, dokumen resmi, buku sejarah, dan karya akademik. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian arsip di beberapa lembaga, antara lain Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Negeri Padang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Padang, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber digital melalui aplikasi Delpher untuk memperoleh arsip surat kabar dan dokumen kolonial yang berkaitan dengan Abdoel Hakim Nasution.

b. Kritik Sumber

Setelah seluruh sumber berhasil dihimpun, tahapan berikutnya adalah melakukan kritik sumber. Tahap ini merupakan proses pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber yang diperoleh guna memastikan tingkat keabsahan dan kredibilitasnya. Melalui kritik internal dan kritik eksternal, peneliti dapat menilai keaslian, keakuratan, serta reliabilitas sumber sejarah yang digunakan.²³ Kritik internal, di sisi lain, fokus pada konten sumber itu sendiri, termasuk bahasa, gaya penulisan, dan informasi yang disajikan, untuk menilai

²² Rikza Fauzan, "Implementasi Materi Sejarah Lokal Gerakan Sosial Messianistik Dan Nativisme Di Banten Melalui Pendekatan Saintifik," *Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 1, no. 2 (2018).

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Tiara Wacana, 2013), h. 92-105.

akurasi dan bias penulis.²⁴ .Dalam penelitian mengenai Abdul Hakim Nasution sebagai Walikota Padang tahun 1947–1949, kritik eksternal dilakukan terhadap arsip, surat kabar kolonial Belanda, buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang membahas kondisi Kota Padang maupun perjalanan karier Abdul Hakim Nasution. Melalui tahapan ini, penulis menyeleksi sumber-sumber yang benar-benar relevan dan sezaman dengan peristiwa yang diteliti.

Sedangkan kritik-kritik intern atau kritik dalam memiliki fungsi untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Untuk menguji kredibilitas sumber (sejauh mana bisa dipercaya) diadakan penilaian instrinsik terhadap sumber dengan mempersoalkan hal-hal tersebut.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis membandingkan berbagai informasi mengenai pengangkatan Abdul Hakim Nasution sebagai Walikota Padang oleh NICA, kondisi politik Kota Padang pada masa revolusi, serta situasi sosial dan keamanan masyarakat antara tahun 1947–1949. Perbandingan tersebut dilakukan antara arsip, surat kabar, buku, dan karya ilmiah lainnya agar diperoleh fakta sejarah yang lebih objektif. Dengan demikian, kritik sumber dalam penelitian ini bertujuan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan kondisi Kota Padang pada masa jabatan Abdul Hakim Nasution sebagai Walikota Padang tahun 1947–1949.

c. Sintesis

Selanjutnya ialah tahapan Sintesis yakni analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Bersama teori-teori yang relevan, fakta-fakta tersebut disusun dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Dengan kata lain, sintesis adalah upaya

²⁴ La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa et al., *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h. 4.

²⁵ Ahmad Ferdi Abdullah, *Perlawanan Rakyat Blambangan Terhadap VOC Tahun 1767–1773*, (Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia) 3, no. 2 (2019): h. 49.

menyatukan fakta-fakta agar dapat memberikan makna yang utuh terhadap peristiwa sejarah.²⁶

Dalam penelitian ini, tahap sintesis dilakukan dengan menghubungkan berbagai fakta mengenai perjalanan karier Abdul Hakim Nasution, mulai dari keterlibatannya dalam pemerintahan kolonial, posisinya dalam Gemeenteraad dan loco-burgemeester, hingga pengangkatannya sebagai Walikota Padang tahun 1947–1949. Selain itu, penulis juga mengaitkan fakta-fakta mengenai kondisi politik, keamanan, sosial, dan administrasi Kota Padang pada masa revolusi kemerdekaan. Melalui proses tersebut, penulis berupaya membangun pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai latar belakang pengangkatan Abdul Hakim Nasution serta kondisi Kota Padang pada masa jabatannya sebagai walikota.

d. Historiografi

Fase terakhir dalam metode sejarah adalah penulisan sejarah atau disebut dengan historiografi. historiografi adalah cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan, dari penulisan itu akan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal (fase perencanaan) sampai dengan akhirnya (penarikan kesimpulan). Secara teoritis historiografi mempunyai dua makna: pertama penulisan sejarah (*historical writting*), kedua sejarah penulisan sejarah (*historical of historical writting*).²⁷

Dalam penelitian ini, tahap historiografi dilakukan dengan menyusun berbagai fakta sejarah mengenai Abdul Hakim Nasution sebagai Walikota Padang tahun 1947–1949 ke dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan kronologis. Penulisan dilakukan berdasarkan data yang telah melalui tahap heuristik, kritik sumber, dan sintesis, sehingga menghasilkan pembahasan yang lebih objektif mengenai latar belakang pengangkatan Abdul Hakim Nasution, perjalanan kariernya, serta kondisi politik, keamanan, sosial, dan pemerintahan Kota Padang pada masa jabatannya. Melalui tahap historiografi

²⁶ Aqmarina Lailani Putri, “Konfusianisme Di Korea Selatan: Kajian Mengenai Pengaruh Budaya Terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, Dan Politik Masyarakat Korea (1962–1979)” (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), h.10, <http://repository.upi.edu>.

²⁷ Herdin Muhtarom and Ilham Arsandi Firmansyah, “Pembelajaran Sejarah Abad 21: Nilai-Nilai Sejarah Lokal Sebagai Identitas Bangsa,” *Jurnal Pendidikan Sejarah* 10, no. 2 (2021): h.257.

ini, penulis berupaya merekonstruksi peristiwa sejarah secara ilmiah agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran Abdul Hakim Nasution dalam pemerintahan Kota Padang pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi yang berjudul “Abdul Hakim Nasution: Wali Kota Padang 1947–1949” ini disusun untuk mempermudah pembahasan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian secara keseluruhan. Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga pembahasan dapat tersusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Membahas kondisi Kota Padang menjelang pengangkatan Abdul Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang. Pembahasan diawali dengan letak geografis dan wilayah administratif Kota Padang, kemudian dilanjutkan dengan situasi politik dan keamanan pasca kemerdekaan, penyebaran berita Proklamasi di Kota Padang, dinamika sosial dan konflik masyarakat pasca-Proklamasi, sejarah terbentuknya BPPI dan BKR, serta pembentukan pemerintahan Republik di Kota Padang. Selain itu, bab ini juga membahas latar belakang kedatangan Sekutu dan NICA, respons masyarakat Kota Padang, konflik antara Sekutu dan NICA dengan masyarakat, hingga penyerahan kekuasaan Sekutu kepada NICA.

BAB III Membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi pengangkatan Abdul Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang tahun 1947–1949. Dalam bab ini diuraikan pengalaman birokrasi dan politik Abdul Hakim sebelum menjadi wali kota serta proses pengangkatannya sebagai Wali Kota Padang. Selanjutnya, bab ini juga membahas posisi Abdul Hakim Nasution sebagai tokoh kooperatif atau non-kooperatif melalui pengertian politik kooperatif dan non-kooperatif serta analisis terhadap sikap politik Abdul Hakim. Selain itu, dibahas pula kondisi Kota Padang pada masa jabatannya yang meliputi kondisi politik di bawah kontrol

Belanda/NICA dan pemerintahan federal Gemeenteraad Padang, kondisi keamanan dan militer, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Padang.

BAB IV : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian mengenai Abdul Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang tahun 1947–1949. Selain itu, pada bagian akhir juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.

